

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Baiq Rosyida Dwi Astuti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

rosyidabaiq@unram.ac.id

Wirawan Suhaedi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

wirawan.suhaedi@unram.ac.id

Intan Rakhmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

intanrakhmawati@gmail.com

Artikel Info

Diterima: 07 Nov. 2021

Disetujui: 02 Juni 2022

Diterbitkan: 03 Juni 2022

DOI:

10.29303/abdimassangkabira.v2i2.81

Abstrak

Hasil penelitian dan data laporan keuangan BUMDes di beberapa kabupaten di NTB menunjukkan kesenjangan antara praktik yang dijalankan dengan konsep bisnis yang sehat. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka dilakukan kegiatan pelatihan pengurus bumdes terkait pemrosesan akuntansi yang layak. Selain pelatihan, kegiatan ini juga melakukan penyusunan dan penyediaan modul akuntansi sederhana dan excel akuntansi. Pelatihan dihadiri oleh perwakilan dari 5 BUMDes di Kecamatan Pujut dan satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Perwakilan BUMDes yang hadir yaitu dari Desa Ketara, Semudane, Mertak, Bangket Parak, dan Kawo. Sedangkan PLD adalah PLD Kawo. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan peserta, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang

menyebabkan terhambatnya aktivitas BUMDes

Kata Kunci: BUMDes, Akuntansi

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kewajiban organisasi pemerintah dan badan-badan yang terkait dengannya, seperti badan usaha milik desa (*bumdes*). *New public management* mengamanatkan akuntabilitas yang menekankan pada praktik kontrol anggaran dan transparansi keuangan (Rahayu dan Juwono, 2019:272). Praktik akuntabilitas selayaknya dijalankan oleh pengelola Bumdes dengan melihat dari dua sisi. Pertama, modal utama yang berasal dari keuangan desa adalah dana desa yang sumber utamanya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Kedua, tujuan didirikannya bumdes adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Akuntabilitas bumdes dapat berbentuk akuntabilitas finansial dan administratif. Bentuk akuntabilitas finansial seperti menerbitkan laporan penyerapan anggaran dan laporan tahunan kepada masyarakat. Sedangkan bentuk akuntabilitas administratif adalah melakukan pelaporan kegiatan tahunan kepada atasan (Rahayu dan Juwono, 2019:273). Hal ini juga ditegaskan dalam Permendesa PDTT No.4/2015 Pasal 12 bahwa pelaksana operasional bumdes berwenang untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha bumdes setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha bumdes setiap bulan dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha bumdes kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Praktik akuntabilitas bumdes di NTB ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian berikut. Hasil penelitian Annas dalam Astuti dkk (2019) menunjukkan bahwa pengurus beberapa bumdes di Kabupaten Lombok Utara tidak secara aktif menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Data yang diperoleh Indriyanthi (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar bumdes di Kec Gunung Sari Kab Lombok Barat belum menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangannya sebagaimana seharusnya. Selain itu data laporan keuangan bumdes Kabupaten Dompu dan Bima tahun 2017 mengindikasikan bahwa penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah kabupaten hanyalah sebagai bentuk pengguguran kewajiban dan formalitas dan pengurus bumdes belum memahami bagaimana proses akuntansi yang seharusnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya neraca yang tidak seimbang, neraca yang disusun setiap bulan, dan laporan keuangan yang tidak artikulatif.

Berdasarkan kesenjangan antara realita di lapangan dengan regulasi dan praktik bisnis yang sehat, maka diperlukan upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan melakukan kegiatan pelatihan pengurus bumdes terkait pemrosesan akuntansi yang layak. Selain pelatihan, kegiatan ini juga melakukan penyusunan dan penyediaan modul akuntansi sederhana dan excel akuntansi. Kegiatan ini diharapkan menjadi input bagi pengurus BUMDes dalam memahami dan melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi, serta memiliki pedoman manual dalam menjalankan pengelolaan keuangan

METODE

Kegiatan ini dilakukan melalui dua tahap yaitu:

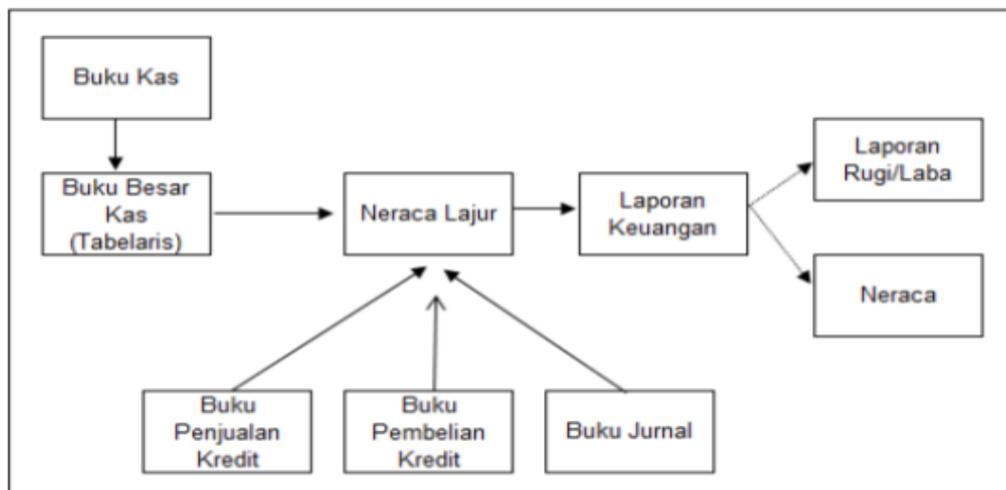
- a. Penyusunan modul akuntansi
Modul akuntansi yang disusun adalah modul pembukuan sederhana perusahaan dan excel akuntansi.
- b. Pelatihan
Pelatihan ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang fungsi akuntansi dalam sebuah organisasi bisnis, proses akuntansi, laporan yang dihasilkan dan teknis penggunaan excel akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Modul Pembukuan Sederhana dan Excel Akuntansi

Dua buah modul yang disusun sebagai bahan kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Modul Pembukuan Sederhana Perusahaan
Modul ini menguraikan tentang pentingnya pembukuan dalam sebuah usaha, jenis pembukuan yang diperlukan serta contoh transaksi dan pencatatannya. Gambar berikut merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang diuraikan dalam modul ini.



b. Modul Excel Akuntansi Usaha Dagang

Modul ini menguraikan proses akuntansi usaha dagang dengan menggunakan Ms. Excel. Modul dimulai dengan pemaparan tentang contoh-contoh transaksi dalam sebuah BUMDes yang melakukan usaha dagang. Bagian kedua adalah pemrosesan excel akuntansi yang diantaranya melibatkan kegiatan memasukkan data persediaan barang ke dalam buku mutasi barang dan buku persediaan barang dagang, memasukkan transaksi penjualan ke buku penjualan harian, menyusun buku besar, kertas kerja dan laporan keuangan.

Sebelum pelatihan dimulai, kedua jenis modul tersebut dikirimkan ke masing-masing pengurus BUMDes yang bersedia mengikuti pelatihan. Pengiriman modul tercetak dilakukan melalui pos dan file modul dikirim melalui email.

Pelatihan

Pelatihan dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021 melalui aplikasi zoom. Pelatihan dilakukan secara online. Pelatihan dihadiri oleh perwakilan dari 5 BUMDes di Kecamatan Pujut dan satu orang Pendamping Lokal Desa (PLD). Perwakilan BUMDes yang hadir yaitu dari Desa Ketara, Semudane, Mertak, Bangket Parak, dan Kawo. Sedangkan PLD adalah PLD Kawo.

Sesi pelatihan dibagi menjadi dua yaitu sesi penyampaian materi oleh anggota tim dan sesi diskusi. Penyampaian materi meliputi materi dasar-dasar akuntansi dan excel akuntansi yang disesuaikan dengan isi modul. Selanjutnya pada sesi kedua dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa pengurus BUMDes tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangannya. Mereka menjalankan usaha BUMDes tanpa didukung oleh pembukuan yang memadai. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh pengurus BUMDes tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai terkait penerapan akuntansi. Selain itu terdapat masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan aktivitas BUMDes terhambat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan proses dan hasil kegiatan adalah bahwa secara umum pengurus BUMDes di Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah tidak melakukan pemrosesan akuntansi dalam pengelolaan keuangan mereka. Mereka menggunakan pembukuan sederhana yang tidak dapat merekam aktivitas dan kondisi usaha BUMDes secara menyeluruh. Selain itu terdapat masalah-masalah teknis di luar pengelolaan keuangan seperti pergantian pengurus yang menyebabkan terhambatnya aktivitas

BUMDes. Dengan demikian, diperlukan pelatihan dan komunikasi yang intensif antara pengurus BUMDes dan pihak lain yang dapat memberikan masukan tentang pengelolaan keuangan BUMDes, seperti universitas, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram yang telah mendukung kegiatan ini; ketua BUM Desa Ketara, Semudane, Mertak, Bangket Parak, dan Kawo serta PLD Kawo yang telah hadir dalam pelatihan; serta Pendamping Desa Kecamatan Pujut Kab Lombok Tengah yang telah menjadi narahubung penulis dengan para pengurus BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, BRD, I Rakhmawati, W Suhaedi, DT Della Nabila, Prosiding Pepadu 1 (1), 2019
- Indriyanthi, Ni Nyoman Ira, 2020, Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat
- Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Rahayu, Amy Y.S., Vishnu Juwono, 2019, Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep dan Aplikasi, Rajawali Pers, Depok